

Analisis Kebijakan Penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi KKNI di STAI Persis Bandung

Ela Komala, Supiana, Qiqi Yuliati Zaqiah

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: komalaela98@gmail.com, supiana@uinsgd.ac.id, qiqiyuliati@uinsgd.ac.id

Article Information

Submitted: 23
October 2023
Accepted: 29
October 2023
Online Publish: 01
November 2023

Abstrak

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah salah satu rujukan nasional untuk meningkatkan mutu dan daya saing bangsa Indonesia di sektor sumberdaya manusia melalui pencapaian kualifikasi sumberdaya manusia Indonesia yang dihasilkan oleh sistem pendidikan dan sistem pelatihan kerja nasional, serta sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penerapan kurikulum berbasis kompetensi KKNI di STAI Persis Bandung, mengetahui bagaimana manajemen kurikulum Perguruan Tinggi dalam mengembangkan Kurikulum Berbasis Kompetensi yang mengacu pada KKNI dalam meningkatkan mutu pendidikan secara umum, serta memperbaiki mutu pendidikan kearah yang lebih baik sebagaimana yang disebutkan dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan yang ada dalam penelitian. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa penerapan kurikulum di STAI Persis Bandung telah sesuai dengan acuan kurikulum KKNI yang berlaku dan setiap komponen manajemen kurikulum yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum sudah berjalan dengan baik, pengembangan manajemen kurikulum juga sesuai dengan SOP dan regulasi kurikulum KKNI, namun dalam pelaksanaannya masih belum sepenuhnya berbasis KKNI

Kata Kunci: *Penerapan Kurikulum, KKNI, Analisis Kebijakan*

Abstract

The Indonesian National Qualifications Framework (KKNI) is a national reference for improving the quality and competitiveness of the Indonesian nation in the human resources sector through achieving qualifications for Indonesian human resources produced by the national education system and job training system, as well as the learning achievement equality assessment system. This research aims to analyze the policy of implementing the KKNI competency-based curriculum at STAI Persis Bandung, find out how the Higher Education curriculum management is in developing a Competency-Based Curriculum that refers to the KKNI in improving the quality of education in general, as well as improving the quality of education in a better direction as mentioned in Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2003 concerning the National Education System. This research method uses a qualitative descriptive approach, namely interpreting phenomena that occur and is carried out by involving those in the research. The results of this research illustrate that the implementation of the curriculum at STAI Persis Bandung is in accordance with the applicable KKNI curriculum reference and each component of curriculum management consisting of curriculum planning, implementation and evaluation has gone well, curriculum management development is also in accordance with the SOP and KKNI curriculum regulations, However, its implementation is still not fully based on the KKNI.

Keywords: Curriculum Application, KKNI, Policy Analysis

Pendahuluan

Perguruan Tinggi memiliki peran sentral dalam upaya menyiapkan sumber daya manusia yang unggul. Menurut Ditjen Dikti (2003) perguruan tinggi di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting, baik sebagai sumber pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan maupun sebagai penghasil lulusan. Dengan demikian, agar perguruan tinggi tidak tertinggal atau ditinggal oleh peserta kuliahnya, pemutakhiran kurikulum perguruan tinggi sangat diperlukan (Gufron, 2004).

Di Indonesia, untuk tingkat Pendidikan Tinggi, berbagai perubahan tersebut menyebabkan perubahan paradigma yang berdampak pada perubahan peran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti). Perubahan paradigma pendidikan berdampak pada perubahan peran lembaga pendidikan tinggi (PT), kurikulum, proses pendidikan dan penilaian. Semua ini mengarah pada perubahan dari Kurikulum Nasional 1994 (Kep Mendikbud No.56/U/1994) menjadi Kurikulum Inti dan Institutional (Kep Mendiknas No. 232/U/2000) atau Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) serta Perpres No.8 tahun 2012 tentang KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).

Selanjutnya, KKNI mengacu pada sistem kualifikasi negara lain, seperti Skotlandia, Eropa, Amerika, dan negara-negara kelompok ASEAN. Kemampuan seperti lulusan doktor.EQF menganut konsep pembelajaran seumur hidup. Sebaliknya, Kerangka Kualifikasi Australia (AQF) mengacu pada sistem kualifikasi yang membagi bidang pendidikan dan pelatihan menjadi tiga bagian, yaitu sekolah menengah, pelatihan kejuruan, dan pendidikan. Namun, perlu dipahami bahwa sistem kualifikasi AQF dianggap terlalu detail sehingga kurang tepat untuk digunakan di Indonesia. Itulah mengapa EQF dianggap paling tepat, sehingga tidak heran jika EQF memiliki pengaruh yang kuat terhadap perkembangan dan persiapan KKNI. Lulusan KKNI dapat diterima negara lain sehingga tenaga kerja Indonesia cepat terserap (Siagian & Siregar, 2018).

Untuk mewujudkan sasaran utama KPPT-JP III tersebut, maka PP No. 30/1990 diganti dengan PP No. 60/1999 dengan dua perubahan yang mendasar. Pertama, struktur kelembagaan yang menyatu dengan struktur program pendidikan di PP Np. 30/1990, yang pada PP No. 60/1999 dipisahkan. Pemisahan antara struktur kelembagaan dengan struktur program pendidikan menjadikan: (i) otonomi penyelenggaraan program pendidikan menjadi lebih terbuka, (ii) mendorong proses resource sharing dan networking secara intenal dan eksternal menjadi lebih efektif dan efisien, dan (iii) mendorong terselenggaranya program-program studi yang gayut dengan kebutuhan masyarakat, serta sesuai dengan kemampuan penyelenggaraan yang unggul dari masing-masing lembaga PT, melalui proses on-off. Perubahan struktur kelembagaan penyelenggaraan PT ini merupakan kelengkapan (complement) untuk melaksanakan perubahan kedua, yaitu perubahan kurikulum yang semula content-based (penguasaan isi ilmu pengetahuan dan keterampilan-PIPK) (SK Mendikbud No. 056/U/1994) ke kurikulum competent - based (berbasis kompetensi KBK) (SK Mendiknas No. 232/U/2000 dan No. 045/U/2002).

Posisi kurikulum di jenjang pendidikan tinggi memang berbeda dari jenjang pendidikan dasar dan menengah. Jika kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah lebih memberikan perhatian yang lebih banyak pada pembangunan aspek kemanusiaan peserta didik maka kurikulum pendidikan tinggi berorientasi pada pengembangan keilmuan dan dunia kerja. Kedua orientasi ini menyebabkan kurikulum di jenjang pendidikan tinggi kurang memperhatikan kualitas yang diperlukan manusia di luar keterkaitannya dengan disiplin ilmu atau dunia kerja. Dalam banyak kasus bahkan terlihat bahwa kurikulum pendidikan tinggi tidak juga memperhatikan hal-hal yang berkenaan dengan kualitas kemanusiaan yang

seharusnya terkait dengan pengembangan ilmu dan dunia kerja. Kualitas kemanusiaan seperti jujur, kerja keras, menghargai prestasi, disiplin, taat aturan, menghormati hak orang lain, dan sebagainya terabaikan dalam kurikulum pendidikan tinggi walau pun harus diakui bahwa Kepmen 232/U/2000 mencoba memberikan perhatian kepada aspek ini.

Dasar pertimbangan pentingnya mengadakan penelitian berjudul “Analisis Kebijakan Penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi KKNi Di STAI Persis Bandung ” ialah untuk mengetahui bagaimana manajemen kurikulum Perguruan Tinggi dalam mengembangkan Kurikulum Berbasis Kompetensi yang mengacu pada KKNi dalam meningkatkan mutu pendidikan secara umum, serta memperbaiki mutu pendidikan kearah yang lebih baik sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Metode Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan yang ada dalam penelitian. Adapun cara pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara yaitu pengumpulan data berbentuk pengajuan pertanyaan secara lisan dan pertanyaan yang diajukan dalam wawancara itu telah dipersiapkan secara tuntas dilengkapi dengan instrumennya. Karena dalam penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif, maka teknik analisis data akan dianalisis dengan tahapan, yaitu pemrosesan satuan (Unityzing), kategorisasi, penafsiran data dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2021).

Hasil dan Pembahasan

Kerangka Teori Kurikulum Berbasis Kompetensi KKNi

Dorongan utama perlunya KKNi berasal dari masalah keselarasan mutu dan keselarasan produk lulusan perguruan tinggi dengan kriteria tenaga kerja yang diharapkan oleh masyarakat pemakai lulusan. Keluhan tentang kesenjangan antara jumlah, mutu dan kemampuan lulusan dengan kriteria yang dibutuhkan dunia kerja sering mengemuka (Dikti, 2010: 4). Dalam kerangka inilah dirasa penting untuk segera merumuskan KKNi guna mengantisipasi permasalahan yang lebih kompleks baik di bidang pendidikan tinggi maupun di bidang ketenagakerjaan Indonesia.

Kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNi) bidang perguruan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi (Permendikbud No. 73 Tahun 2013).

Kurikulum kualifikasi nasional pendidikan (KKNi) merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya, yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), konsep kurikulum yang menekankan aspek pengembangan kompetensi dalam penugasan dengan standar tertentu sehingga dapat dirasakan hasilnya oleh peserta didik berupa penguasaan seperangkat kompetensi yang meliputi seperangkat pengetahuan, kemampuan, sikap, dan minat. peserta didik agar mampu melakukan sesuatu berupa kecakapan dalam belajar dengan penuh tanggung jawab. Crunkilton dalam (Suteja & Cirebon, 2017). Kompetensi ialah sebagai penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan”. Hal tersebut menunjukkan bahwa kompetensi mencakup tugas, keterampilan, sikap dan apresiasi yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pembelajaran sesuai dengan jenis pekerjaan tertentu (Mulyasa, 2022). Dengan demikian terdapat hubungan (link) antara tugas-tugas yang dipelajari peserta

didik di sekolah dengan kemampuan yang diperlukan oleh dunia kerja (market).

Kurikulum berbasis kompetensi memiliki karakteristik antara lain mencakup seleksi kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator-indikator, evaluasi untuk menentukan kesuksesan pencapaian kompetensi dan pengembangan sistem pembelajaran. Sehubungan dengan itu Depdiknas (2002) mengemukakan bahwa kurikulum berbasis kompetensi memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

- a. Menekankan pada kecakapan kompetensi mahasiswa baik secara individu maupun klasikal.
- b. Berorientasi pada hasil belajar (learning outcomes) dan keberagaman.
- c. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi.
- d. Sumber belajar bukan hanya dosen tetapi juga sumber lain yang memenuhi unsur edukatif.
- e. Penilaian penekanan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi
- f. Mulyasa (2006:43) mengemukakan terdapat enam karakteristik pembelajaran dalam kurikulum berbasis kompetensi, yaitu:
- g. Sistem belajar dengan modul
- h. Menggunakan keseluruhan sumber belajar
- i. Pengalaman lapangan
- j. Strategi belajar individual personal
- k. Kemudahan belajar, dan
- l. Belajar tuntas.

Prinsip Pengembangan KKNI

Dalam kurikulum pendidikan tinggi sesuai dengan PP No.17 Tahun 2010 pasal 97 disebutkan bahwa kompetensi merupakan integrasi antara kemampuan kognitif, psikomotor dan afektif. Hal ini merupakan perubahan dari prinsip kurikulum sebelumnya yang bertujuan untuk mencapai penguasaan ilmu kognitif. Dalam kurikulum berbasis kompetensi ini, pengetahuan merupakan media penting untuk penguasaan kompetensi. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. (Kepmen RI NOMOR 045/U/2002).

Tahapan Pengembangan KKNI di Perguruan Tinggi

Pengembangan kurikulum di Perguruan Tinggi dimulai dengan penentuan hasil belajar, yaitu pembelajaran yang diawali dengan penentuan profil lulusan. Profil lulusan adalah gambaran tentang peran yang dapat dilakukan lulusan, setelah mereka terjun ke masyarakat atau setelah mereka lulus dari Perguruan Tinggi. Mungkin ada lebih dari satu profil lulusan suatu program studi, menurut analisis yang dilakukan secara eksternal terhadap lulusan melalui studi pelacakan dan sinyal pasar tenaga kerja, serta analisis internal melalui visi ilmiah dan analisis SWOT program studi. Setelah profil lulusan ditentukan, langkah selanjutnya adalah merumuskan kompetensi yang diturunkan dari profil lulusan tersebut. Dengan menjawab pertanyaan “keterampilan apa yang harus dimiliki untuk menjadi profil A?”. Jawaban atas pertanyaan ini kemudian akan menjadi kompetensi lulusan. Sesuai dengan ketentuan Permendiknas 045/U/2002, kompetensi lulusan meliputi Kompetensi Utama (karakteristik program studi), Kompetensi Penunjang dan lain-lain (karakteristik kelembagaan).

Dari rumusan kompetensi yang telah ditentukan, kemudian dilakukan pengecekan terhadap isi dari 5 unsur kompetensi tersebut. Jika isi rumusan kompetensi sudah benar-benar

memenuhi kelima unsur kompetensi tersebut, maka dapat dilanjutkan ke tahap penentuan mata kuliah. Namun jika belum sepenuhnya memenuhi unsur kompetensi yang ada, maka perlu dilakukan modifikasi dan reformulasi kompetensi lulusan.

Pengembangan mata kuliah dilakukan dengan membuat matriks hubungan antara rumusan kompetensi dengan materi kajian (ilmu) yang membentuk kompetensi tersebut. Mata kuliah merupakan strategi satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi melalui berbagai model pembelajaran. Selanjutnya, setelah mata kuliah terbentuk, dihitung SKS untuk setiap mata kuliah yang ada. Pertimbangan pemberian kredit adalah: (1) kedalaman materi (bentuk kompetensi mata kuliah); (2) keluasan materi (berupa jumlah/keluasan kajian yang dibutuhkan); (3) strategi pembelajaran; dan (4) proporsional dengan jumlah SKS yang diberikan pada program studi (misalnya S1 sebanyak 144 SKS)

Langkah terakhir adalah mengembangkan struktur kurikulum. Struktur kurikulum merupakan penyajian mata kuliah pada setiap semester. Pada kurikulum berbasis kompetensi, struktur yang digunakan adalah struktur paralel, bukan struktur serial. Struktur paralel mengatur penyajian mata kuliah sesuai dengan pencapaian kompetensi. Sedangkan struktur rangkaian mengatur penyajian mata kuliah berdasarkan logika ilmiah. Di bawah ini adalah tabel tahapan penyusunan kurikulum di perguruan tinggi sebagai berikut:

Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi KKNi dalam Proses Pembelajaran

Perubahan kurikulum tidak hanya terjadi pada tataran kebijakan dan dokumen, tetapi harus diikuti dengan perubahan dalam implementasinya. Salah satu prinsip utama yang berubah dalam proses pembelajaran berbasis kompetensi di perguruan tinggi adalah, pencapaian hasil belajar tidak lagi didasarkan pada penguasaan isi kajian dan ilmu pengetahuan, tetapi bagaimana ilmu tersebut diterapkan dan dikembangkan dalam peran lulusan. Setelah mahasiswa meninggalkan perguruan tinggi. Kurikulum pendidikan tinggi khususnya perguruan tinggi Islam selain bertujuan untuk mengembangkan ilmu juga berprinsip pada pengembangan kehidupan sosial Islami, artinya tuntutan yang diinginkan oleh masyarakat adalah pengabdian masyarakat baik dalam aspek sosial maupun keagamaan (Al-Jumbulati et al., 1994).

Sebelum lebih lanjut membahas implementasi kurikulum perlu dipahami dahulu bahwa implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan (Purwanto & Sulistyastuti, 2012). Asumsi utama dari konsep implementasi adalah penerapan suatu produk kebijakan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.

Dalam menganalisis masalah implementasi, Charles O. Jones mengartikan penerapan atau implementasi sebagai suatu aktifitas yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program (Rohman & Lamsuri, 2009). Ada tiga pilar dalam mengoperasikan program tersebut, yaitu:

- a. Pengorganisasian, pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit-unit serta metode untuk menjalankan program agar bisa berjalan;
- b. Interpretasi, aktifitas menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan;
- c. Aplikasi, berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, pembayaran, atau yang lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Operasionalisasi kurikulum berbasis KKNi di STAI Persis Bandung, selanjutnya dianalisa melalui ketiga pilar implementasi tersebut. Pengorganisasian sumber daya untuk menerapkan kurikulum, interpretasi mereka terhadap kurikulum berbasis KKNi, dan pengaplikasian peran yang dibebankan kepada pihak-pihak seperti dosen maupun mahasiswa dalam rangka penerapan kurikulum berbasis KKNi.

Lebih khusus, implementasi kurikulum perguruan tinggi didefinisikan oleh Loucks dan

Lieberan dalam Ridwan (2016) sebagai mencoba praktik baru dan apa yang akan tampak ketika benar-benar digunakan dalam sistem kampus. Selanjutnya diharapkan suatu perubahan menuju perbaikan-perbaikan yang diinginkan. Penerapan kurikulum berbasis KKNI sebagai suatu program juga diharapkan membawa perbaikan-perbaikan kualitas out put mahasiswa.

Mekanisme Penerapan Kurikulum KKNI di STAI Persis Bandung a) Arah Kebijakan Penyusunan Kurikulum Berbasis KKNI di STAI Persis Bandung

Langkah-langkah penyusunan kurikulum pendidikan tinggi berbasis KKNI yaitu Pertama, melakukan analisa SWOT lembaga pendidikan tinggi dalam rangka menghasilkan lulusan yang mampu beradaptasi dengan lingkungan, Kedua, melakukan analisis kebutuhan akan tenaga kerja dan pasarnya. Ketiga, melakukan penetapan profil lulusan yang mengacu pada jenjang kualifikasi KKNI. Keempat, merumuskan dan menetapkan kompetensi lulusan atau capaian pembelajaran, Kelima, melakukan pemetaan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, dengan merujuk pada capaian pembelajaran. Keenam, pemenuhan standar isi disesuaikan dengan kualifikasi KKNI, Ketujuh, penentuan mata kuliah dan besarnya SKS, dan Kedelapan, melakukan penyusunan struktur kurikulum atau mata kuliah dalam setiap semester (Suyadi, 2015).

Rujukan penyusunan kurikulum harus mengacu kepada berbagai kebijakan maupun standar nasional yang disesuaikan dengan karakteristik pendidikan tinggi yang wajib menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Cakupan standar pendidikan tinggi lebih luas dari delapan standar yang ditetapkan dalam Permendikbud RI Nomor 03 Tahun 202 tentang Standar

Nasional Pendidikan. Penerbitan Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), menuntut kurikulum pendidikan tinggi juga merujuk kepada cakupan capaian pembelajaran yang ditunjukkan oleh seorang lulusan. Kata kunci yang mengkaitkan antara kurikulum dengan KKNI adalah capaian pembelajaran (CP) dan kualifikasi. Pengemasan CP ke dalam jenjang kualifikasi KKNI sangat penting untuk keperluan penyetaraan kualifikasi dan rekognisi antara tingkat pendidikan dan tingkat pekerjaan. Di samping itu, pengemasan CP ke dalam KKNI juga penting untuk keperluan harmonisasi dan kerjasama saling pengakuan kualifikasi dengan negara lain, baik secara regional maupun secara internasional.

Pengembangan kurikulum Program Studi di STAI Persis Bandung didasarkan atas berbagai kebijakan yang ada sebagai berikut ini.

- (1) Penyusunan kurikulum dilakukan dengan mempertimbangkan capaian visi STAI Persis Bandung.
- (2) Penyusunan kurikulum dilakukan dengan berpedoman pada Dokumen SPMI STAI Persis Bandung.
- (3) Kurikulum senantiasa dapat diperbaharui (living document) sesuai dengan perubahan dan perkembangan paradigma pendidikan tinggi atas dasar telaah kritis dengan didukung bukti ilmiah yang mengarah kepada kompetensi KKNI.
- (4) Penyusunan kurikulum dilakukan dengan melibatkan tenaga ahli, stakeholder, (pemaangku kepentingan), civitas akademika program studi untuk mendapatkan masukan.
- (5) Pengembangan kurikulum didukung oleh landasan yuridis, landasan filosofis, dan landasan teoritis.
- (6) Pengembangan kurikulum atas dasar Landasan Yuridis dengan mempertimbangkan peraturan-peraturan yang berlaku.
- (7) Pengembangan kurikulum atas dasar landasan teoretis didasarkan atas ilmu dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang mencakup relevansi, kontinuitas, fleksibilitas, efektivitas, dan pragmatis. (Tim Penyusun Dokumen Kurikulum STAI Persis Bandung)

b) Langkah Perancangan Dokumen Kurikulum

Langkah-langkah yang ditempuh dalam perancangan dokumen kurikulum ini adalah sebagai berikut:

Penetapan profil lulusan

Aspek-aspek yang harus menjadi pertimbangan di antaranya adalah: sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan, tanggung jawab dan hak yang akan menjadi tanggung jawab oleh seorang lulusan. Kesesuaian tersebut dilakukan dengan cara membandingkannya dengan deskriptor generik KKNI. Untuk membangun kekhasan (menonjolkan ciri khas) program studi, dianjurkan agar mengidentifikasi keunggulan atau kearifan lokal/daerah (Suyadi, 2015).

Penetapan profil lulusan merupakan rumusan peran yang dimiliki oleh lulusan program studi berdasarkan bidang keahlian atau kesesuaiannya dengan bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Profil lulusan ditetapkan berdasarkan:

- a) Hasil kajian terkait dengan kebutuhan pasar kerja (pemerintah, dunia usaha, industri, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi).
- b) Melakukan studi pelacakan alumni (tracer study) baik melalui temu alumni, Forum Group Discussion (FGD) atau kegiatan yang lainnya yang mengikutsertakan alumni
- c) Mengidentifikasi peran lulusan berdasarkan tujuan diselenggarakannya program studi sesuai dengan visi misi.
- d) Membuat kesepakatan bersama dengan program studi yang sejenis sehingga ada penciri umum program studi. (Dokumen STAI Persis Bandung)

Penetapan Capaian Pembelajaran

Deskripsi capaian pembelajaran (CP) menjadi komponen penting dalam rangkaian penyusunan kurikulum pendidikan tinggi (KPT). Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa CP/LO merupakan akumulasi atau resultan dari keseluruhan proses belajar yang telah ditempuh oleh seorang mahasiswa selama menempuh studi pada satu program studi tertentu (Suyadi, 2015).

Di STAI Persis Bandung Rujukan dalam merumuskan capaian pembelajaran lulusan program studi mengacu:

- a) Deskripsi Capaian Pembelajaran (CP) yang mencakup aspek-aspek pembangun jati diri bangsa, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan untuk dapat melakukan kerja secara bermutu, serta wewenang dan kewajiban seseorang sesuai dengan level kualifikasinya. Aspek pembangun jati diri bangsa tercermin dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhineka Tunggal Ika yaitu menjunjung tinggi pengamalan kelima sila Pancasila dan penegakan hukum, serta mempunyai komitmen untuk menghargai keragaman agama, suku, budaya, bahasa, dan seni yang tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia.
- b) Unsur keterampilan khusus dan pengetahuan dapat merujuk pada deskripsi KKNI dan dapat ditambah penciri PTKI serta program studi.
- c) Untuk program studi Tarbiyah, dalam merumuskan CPL dengan merujuk pada Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru. 4)
- d) Penetapan profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan merujuk pada peraturan Direktur Jenderal Pendis Kemenag RI Nomor 2500 tahun 2018.

Penetapan Bahan Kajian

Penetapan mata kuliah untuk kurikulum yang sedang berjalan dilakukan dengan mengevaluasi tiap-tiap mata kuliah dengan acuan CPL prodi yang telah ditetapkan terlebih

dahulu. Evaluasi dilakukan dengan mengkaji seberapa jauh keterkaitan setiap mata kuliah (materi pembelajaran, bentuk tugas, soal ujian, dan penilaian) dengan CPL yang telah dirumuskan.

Matriks tersebut terdiri dari bagian kolom yang berisi mata kuliah yang sudah ada (mata kuliah yang sedang berjalan), dan bagian baris berisi CPL prodi (terdiri dari sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan) yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Evaluasi terhadap mata kuliah yang ada dilakukan dengan melihat kesesuaiannya dengan butir-butir CPL tsb. Butir CPL yang sesuai dengan mata kuliah tertentu diberi tanda. Matriks tersebut di atas dapat menguraikan hal-hal berikut: 1) Mata kuliah yang secara tepat sesuai dengan beberapa butir CPL yang ditetapkan dapat diberi tanda pada kotak, dan mata kuliah tersebut dapat ditetapkan sebagai bagian dari kurikulum baru. Pemberian tanda berarti menyatakan ada bahan kajian yang dipelajari atau harus dikuasai untuk memberikan kemampuan pada mahasiswa sesuai butir CPL tersebut. 2) Bila terdapat mata kuliah yang tidak terkait atau tidak berkontribusi pada pemenuhan CPL, maka mata kuliah tersebut dapat dihapuskan atau diintegrasikan dengan mata kuliah lain. Sebaliknya bila ada beberapa butir dari CPL belum terkait pada mata kuliah yang ada, maka dapat diusulkan mata kuliah baru.

Setelah bahan kajian ditentukan bobot keluasan dan kedalamannya pada setiap CP yang ditentukan, langkah selanjutnya adalah Penyusunan mata kuliah. Dalam menentukan mata kuliah, terdapat beberapa hal yang dapat diperhatikan antara lain:

- a) Pola penentuan mata kuliah dapat dilakukan dengan mengelompokkan bahan kajian yang setara, kemudian memberikan nama pada kelompok bahan kajian tersebut;
- b) Nama mata kuliah disesuaikan kelazimannya dalam program studi sejenis. Hal tersebut didasarkan atas kesamaan rumusan CPL pada program studi. (Tim Penyusun Dokumen Kurikulum STAI Persis Bandung).

Penetapan Bobot SKS Mata Kuliah

Penentuan besaran SKS Mata Kuliah dapat dilakukan dengan cara membagi beban mata kuliah dengan beban total mata kuliah untuk seluruh CP dikalikan dengan minimum jumlah SKS setiap jenjang (misalnya Sarjana, Magister, dan Doktor).

Penyusunan Struktur Kurikulum

Dalam penyusunan struktur kurikulum bentuk organisasi matrik mata kuliah per semester perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Tahapan pembelajaran mata kuliah yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- b) Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah baik secara vertikal maupun horizontal;
- c) Beban belajar mahasiswa secara normal antara 8 – 10 jam per hari per minggu yang setara dengan beban 17 - 21 sks per semester;
- d) Proses penyusunannya melibatkan seluruh dosen program studi dan selanjutnya ditetapkan oleh program studi.
- e) Struktur mata kuliah program studi terdiri dari: mata kuliah penciri Institusi dan wajib nasional; dan mata kuliah penciri program studi. (Tim Penyusun Dokumen Kurikulum STAI Persis Bandung).

Penyusunan Kode Mata Kuliah

- a. Mata Kuliah di setiap Program Studi di STAI Persis Bandung terdiri dari Mata Kuliah Institusi dan Mata Kuliah Program Studi (MKP).

- b. Kode Mata Kuliah ditulis dalam ruang 6 digit dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Digit ke 1, 2 dan 3 menyatakan kode Institusi
 - ii. Digit ke 4 menyatakan Semester mata kuliah yang berlangsung
 - iii. Digit ke 5 dan 6 menyatakan Nomor urut mata kuliah pada semester yang bersangkutan.
 - iv. Digit ke 1, 2 dan 3 menyatakan kode tingkatan mata kuliah yang mengikuti aturan.

Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester

Rencana kegiatan belajar mahasiswa dituangkan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau nama lainnya yang disusun oleh dosen atau tim dosen. Pembelajaran Semester (RPS) ini merupakan kegiatan atau mengkoordinasikan komponen-komponen pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, cara penyampaian kegiatan (metode, model dan teknik) serta cara menilainya menjadi jelas dan sistematis, sehingga proses belajar mengajar selama satu semester menjadi efektif dan efisien. Tahapan perancangan pembelajaran:

- a) Mengidentifikasi CPL yang dibebankan pada mata kuliah;
- b) Merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah berdasarkan CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut;
- c) Merumuskan sub-CPMK yang merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan dirumuskan berdasarkan CPMK;
- d) Melakukan analisis pembelajaran untuk memberikan gambaran pada mahasiswa terkait tahapan pembelajaran yang akan dijalani, sebagai berikut:
- e) Melakukan analisis kebutuhan belajar untuk mengetahui kebutuhan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran, serta perangkat pembelajaran yang diperlukan;
- f) Menentukan indikator pencapaian Sub-CPMK sebagai kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL;
- g) Menetapkan kriterian penilaian dan mengembangkan instrument penilaian pembelajaran berdasarkan indikator pencapaian sub-CPMK;
- h) Memilih dan mengembangkan bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, dan penugasan mahasiswa sebagai pengalaman mengajar;
- i) Mengembangkan materi pembelajaran dalam bentuk bahan ajar dan sumber sumber pembelajaran yang sesuai.

Tahapan Evaluasi Kurikulum

Bagian akhir dari penyusunan kurikulum KKNi adalah proses evaluasi. Evaluasi adalah Usaha peningkatan kualitas pendidikan dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas pembelajaran dan kualitas system penilaian. Keduanya saling terkait, sistem pembelajaran yang baik akan menghasilkan kualitas belajar yang baik. Selanjutnya sistem penilaian yang baik akan mendorong guru untuk menentukan strategi mengajar yang baik dan memotivasi siswa untuk belajar yang lebih baik (Mardapi, 2004).

Di STAI Persis Bandung, Evaluasi kurikulum program studi dilakukan 5 (lima) tahun sekali dan harus mengacu pada pencapaian misi pembelajaran STAI Persis Bandung yang dirumuskan dalam 5 arah pengembangan, yaitu:

- a) Inner capacity building (pembinaan kapasitas dan potensi dalam diri manusia);
- b) Intellectual and academic capacity building (pembinaan kapasitas intelektual dan akademik);
- c) Keagungan akhlak, kedalaman spritual, kekokohan akidah, keluasan ilmu dan kematangan profesionalisme;

- d) Social capacity building (pembinaan kapasitas sosial);
- e) Enterpreneurship and managerial capacity building (pembinaan kapasitas kewirausahaan dan manajerial).

Selain dari 5 hal tersebut, perubahan kurikulum dapat juga didasarkan pada beberapa hal berikut;

- a) Perkembangan ilmu pengetahuan;
- b) Kebijakan pemerintah;
- c) Kebutuhan pengguna lulusan;
- d) Hasil evaluasi kurikulum yang sedang berjalan.

Peninjauan Kurikulum

Peninjauan kurikulum merupakan upaya penyempurnaan kurikulum yang dilakukan oleh program studi setelah melakukan evaluasi terhadap implementasi kurikulum dan kesesuaian kurikulum dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Berikut ini merupakan mekanisme peninjauan kurikulum STAI Persis Bandung:

- a) Persiapan implementasi kurikulum oleh Wakil Ketua Bidang Akademik dan Ketua Prodi;
- b) Penyusunan dokumen pendukung kurikulum oleh ketua prodi tim penyusun kurikulum;
- c) Evaluasi dokumen oleh LPM;
- d) Evaluasi proses pembelajaran oleh LPM;
- e) Penyusunan dokumen dan proses penyempurnaan dokumen oleh Ketua prodi dan Tim Penyusun Kurikulum.

Penetapan Kurikulum

Penetapan kurikulum merupakan proses pemberlakuan kurikulum pada program studi dalam lingkup STAI Persis Bandung. Penetapan kurikulum program studi dilakukan oleh Ketua STAI Persis Bandung. Adapun mekanisme penetapan kurikulum program studi melalui tahapan sebagai berikut:

- a) Ketua Prodi dan Tim pengembang kurikulum menyiapkan draf kurikulum;
- b) Program studi mengusulkan kepada Wakil Ketua bidang Akademik untuk mendapatkan pertimbangan dan surat pengantar ke Ketua terkait penetapan kurikulum;
- c) Wakil Ketua bidang Akademik membaca dan memberi pertimbangan atas usul penetapan kurikulum, dan menandatangani surat pengantar ke Ketua;
- d) Ketua menerima surat usul penetapan kurikulum dari Wakil Ketua bidang Akademik dan meneruskannya ke Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk pengecekan struktur dan isi kurikulum;
- e) LPM melakukan tinjauan kurikulum;
- f) Jika terdapat kekurangan, Ketua Prodi dan Tim pengembang melengkapi kekurangan file kurikulum;
- g) LPM memberi rekomendasi penetapan kurikulum program studi kepada Ketua;
- h) Ketua menetapkan pemberlakuan kurikulum program studi setelah mendapatkan rekomendasi dari LPM.

Kesimpulan

Penerapan kurikulum berbasis KKNI yang dilaksanakan di STAI Persis Bandung sudah terlaksana cukup baik. Hal ini dapat dilihat pada aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang sudah terlaksana namun masih perlu melakukan perbaikan mutu. Manajemen kurikulum berbasis KKNI sangat menentukan mutu lulusan perguruan tinggi

Analisis Kebijakan Penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi KKNI di STAI Persis Bandung

Islam. Aspek-aspek kurikulum dapat semakin berkualitas apabila pimpinan dan stakeholder berkomitmen melakukan optimalisasi dalam melaksanakan manajemen kurikulum berbasis KKNI dengan memperhatikan standar mutu. Semua civitas akademika dan tenaga kependidikan berkomitmen melakukan perbaikan dan terus menembangkan kurikulum KKNI yang dilaksanakan di STAI Persis Bandung. Sejatinya kurikulum yang baik adalah kurikulum yang mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi yang berbasis pada masyarakat serta nilai-nilai Al-Qur'an.

Pengembangan manajemen kurikulum pada perguruan tinggi Islam harus memperhatikan SOP dan regulasi kurikulum KKNI. Seluruh Kaprodi sangat menentukan arah dan tujuan kurikulum yang telah dibuat. Kurikulum STAI Persis Bandung harus bisa merespon tuntutan dan perkembangan pendidikan Islam dewasa ini. Dengan begitu, kualitas kurikulum perguruan tinggi Islam dapat bersaing dengan dunia global.

BIBLIOGRAFI

- Al-Jumbulati, A., Arifin, H. M., & At-Tuwaanisi, A. F. (1994). *Perbandingan Pendidikan Islam*. PT Rineka Cipta.
- Gufron, A. (2004). Urgensi Kurikulum Berbasis Kompetensi bagi Lembaga Pendidikan Tinggi di Indonesia: Tuntutan atau Kegagapan Perubahan. *Jurnal Lektur*, 10.
- Mardapi, D. (2004). Kurikulum 2004 dan optimalisasi sistem evaluasi pendidikan di sekolah. *Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Kurikulum*.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, H. E. (2022). *Manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah*. Bumi Aksara.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi kebijakan publik: konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gave Media.
- Rohman, A., & Lamsuri, M. (2009). *Politik ideologi pendidikan*. LaksBang Mediatama bekerja sama dengan Kantor Advokat" Hufron & Hans Simaela.
- Siagian, B. A., & Siregar, G. N. S. (2018). Analisis penerapan kurikulum berbasis kkn di Universitas Negeri Medan. *PEDAGOGIA Jurnal Ilmu Pendidikan*, 16(3), 327–342.
- Suteja, J., & Cirebon, I. S. N. (2017). Model-model pembelajaran dalam kurikulum berbasis kompetensi kkn di perguruan tinggi. *Jurnal Edueksos*, 6(1), 81–100.
- Suyadi, S. (2015). Desain Kurikulum Perguruan Tinggi Mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. *PT. Remaja Arikunto, Suharsimi.(2009). Penelitian Tindakan Kelas.(Jakarta: Bumi Aksara).*

Copyright holder:

Ela Komala, Supiana, Qiqi Yuliati Zaqiah (2023)

First publication right:

Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

This article is licensed under:

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

